

Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2024 di Kota Cimahi

Indra Kristian^{1*}, Yamardi²

^{1,2} Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

*Korespondensi: *technician2007@gmail.com*

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 07-04-2024)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-12-2024)

ABSTRAK

Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 menjadi momentum penting dalam demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks politik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kota Cimahi terbagi menjadi empat kategori utama: rasional, emosional, tradisional, dan pragmatis. Faktor yang berpengaruh meliputi demografi, pengaruh media, peran tokoh masyarakat, kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, serta strategi kampanye. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemilih di Kota Cimahi dipengaruhi oleh kombinasi aspek rasional dan emosional, sehingga strategi kampanye harus menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku pemilih dapat meningkatkan efektivitas komunikasi politik dan strategi elektoral di masa mendatang.

Keywords: Perilaku Pemilih, Pemilu 2024, Kota Cimahi, Politik Lokal, dan Strategi Kampanye

Kristian, Indra & Yamardi. 2024. Perilaku Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2024 di Kota Cimahi

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat mereka. Pemilu 2024 di Kota Cimahi menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang lebih luas. Dalam beberapa dekade terakhir, perilaku pemilih mengalami perubahan signifikan akibat berbagai faktor seperti kemajuan teknologi informasi, meningkatnya kesadaran politik, dan perubahan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perilaku pemilih terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Saat ini, Kota Cimahi memiliki karakteristik demografi yang beragam dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa keputusan pemilih didasarkan pada informasi yang objektif dan rasional. Harapan terhadap pemilu yang transparan dan partisipatif semakin meningkat, sehingga mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang membentuk perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perilaku pemilih pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 di Kota Cimahi? (2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih di Kota Cimahi? Dengan memahami pola pemilih, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas strategi politik mereka.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemilu dan Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Istilah ini mulai

digunakan pada abad ke-5 SM dengan pengertian pemerintahan oleh rakyat, yang kemudian Abraham Lincoln mengartikannya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung maupun perwakilan. Samuel P. Huntington mengartikan demokrasi sebagai keputusan-keputusan kolektif yang kuat yang dibuat oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara di mana hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara (Nugroho, 2013: 250).

Keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada keberhasilan pemilu. Dalam kerangka ciri negara demokratis, Budiardjo mengemukakan ada tiga hal yang menjadi ukurannya adalah negara berdasarkan hukum, kontrol yang efektif kepada pemerintahan, pemilu yang bebas dan jaminan terhadap hak-hak demokratis. Sebagai proses politik, pemilu (*election*, *general election*) sangat berkaitan dengan partai politik (Budiarjo, 2008). Dalam konteks ini, Scully (1995) menyebut bahwa, “parties are the main link between people and government in the Contemporary world”. Menurut Surbakti bahwa “pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai” (Surbakti, 1992).

Begitu pentingnya pemilu, maka ada beberapa nilai dasar utama yang dimiliki oleh pemilu, seperti yang diungkapkan oleh AA GN Dwipayana dalam bukunya, *Memperkuat Demokrasi Elektoral: Isu-isu Kritis dalam Perubahan UU Pemilu* (2010). Pertama, pemilu adalah wadah aktualisasi kewarganegaraan (*citizenship*), terutama penyelenggaraan hak-hak politik warga

negara. Kualitas pemilu diukur dari penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam menggunakan hak-hak politik. Termasuk, tidak adanya intimidasi, diskriminasi, serta untuk memperoleh informasi alternatif. Kedua, seberapa tinggi tingkat kompetisi (competitiveness) kontestasi dimungkinkan. Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana persaingan berjalan secara kompetitif, kontestan dapat bersaing secara fair untuk mendapatkan dukungan dari warga pemilih, sekaligus mereka memperoleh informasi setara tentang kontestan. Ketiga, derajat keterwakilan (representativeness) yang dihasilkan oleh proses pemilu. Esensi pemilu adalah metode untuk memilih perwakilan warga yang representatif. Kualitas pemilu diukur oleh tingkat keterwakilan yang dihasilkan oleh sebuah pemilu. Semakin tinggi tingkat keterwakilan politik warga maka pemilu semakin berkualitas. Sebaliknya, derajat keterwakilan yang rendah menunjukkan kegagalan sistem ini. Pemilu yang berkualitas dan demokratis akan sangat dipengaruhi tiga faktor, yaitu electoral law, electoral process, dan electoral management. Perpaduan tiga pilar tersebut secara resultan menghasilkan electoral outcome. Electoral law menyangkut pilihan sistem pemilu yang digunakan warga negara dalam memilih para wakilnya. Sistem pemilu memiliki konsekuensi terhadap derajat keterwakilan atas hasil-hasil pemilu, sistem kepartaian (khususnya jumlah partai politik), akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi partai-partai politik. Dinamika perseteruan, antara representasi politik dan efektivitas pemerintahan tersebut, dapat dilihat dalam undang-undang politik yang digunakan dalam setiap pemilu. Landasan hukum sebagai penataan untuk electoral law, electoral process, dan electoral management, sekaligus kesatuan rangkaian penataan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilu, dan

sistem kepartaian, terus mengalami perubahan seakan tiada ujung. (Heryanto, 2022).

Hal ini pernah disampaikan oleh Robert Dahl bahwa pemilihan umum (pemilu) sesungguhnya merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi pemerintahan demokrasi pada zaman modern. (Hasan, 2023). Kualitas pelaksanaan pemilu tentu sangat menentukan apakah sudah demokratis atau masih belum. Keberhasilan pemilu dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satu jenis partisipasi politik yang disalurkan melalui pemilu adalah memilih. Partisipasi ini sangat penting berkaitan dengan persoalan penyerahan kedaulatan yang dimiliki atas nama rakyat kepada para pemimpin yang dikehendaki. Partisipasi politik itu harus lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilih agar lebih rasional dan berkualitas. Menurut Iding Hasan bahwa "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu akan lebih sempurna jika dibarengi dengan bekal-bekal politik antara lain pengetahuan politik (political knowledge) yang memadai. Dengan kata lain, masyarakat bukan sekadar berpartisipasi dengan memberikan suara mereka saat pemilu, melainkan juga memiliki pengetahuan politik yang cukup misalnya mengenal betul siapa caleg-caleg yang mereka akan pilih. Dalam konteks ini masyarakat tidak perlu segan-segan untuk mencari tahu misalnya dengan menelusuri rekam jejak (track record) dari para caleg yang hendak mereka pilih. Ini menjadi penting karena dengan bekal pengetahuan politik yang memadai, masyarakat dapat memilih caleg-caleg yang layak untuk mengisi gedung parlemen (Hasan, 2023).

Jenis-Jenis Perilaku Pemilih

Terdapat 3 jenis perilaku pemilih yang sudah disepakati para ahli ilmu politik dunia, yang menurut uraian Sofian Munawar bahwa Dieter Roth (2009)

menyebutkan bahwa apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak ada hanya satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya. Namun menurutnya, secara umum terdapat tiga macam pendekatan atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilu, yaitu pendekatan sosiologis atau sosial struktural, model psikologi sosial, dan model pilihan rasional (*rational choice*). Menurut Dieter Roth, ketiga pendekatan itu tidak sepenuhnya berbeda, dan dalam beberapa hal ketiganya bahkan saling membangun dan mendasari serta memiliki urutan kronologis yang jelas. Perbedaan antara ketiga pendekatan ini terletak pada titik beratnya satu sama lain.

Pertama, pendekatan sosiologis atau sosial struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (a) status sosio-ekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, bahkan (e) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman). Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960) dan Lazarsfeld (1968) hanya untuk menyebut beberapa nama, mempunyai kaitan kuat dengan perilaku pemilih. Penelitian mengenai perilaku ini awalnya diprakarsai sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia (Columbia's School) yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940. Mereka mendapati pola perilaku pemilih yang menunjukkan adanya kaitan erat antara pemilih dengan aspek-aspek sosial struktural yang lebih dominan. Lazarsfeld (1968) misalnya memberi contoh bahwa dari segi kelas, para pemilih dari kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas

menyokong Partai Republik. Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik.

Kedua, pendekatan psikologis atau psikologi social. Model ini dikembangkan beberapa sarjana ilmu politik dari Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre atau sering disebut sebagai Michigan's School. Dieter Roth menjelaskan bahwa para peneliti dari Michigan's School lebih melihat perilaku pemilu dengan mengkaji sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut mereka, persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihannya dalam pemilu. Selain itu, "keanggotaan psikologis" dalam sebuah partai dapat diukur juga dalam bentuk variabel identifikasi partai yang juga turut mempengaruhi keputusan atas pilihannya dalam pemilu.

Ketiga, pendekatan pilihan rasional atau *rational choice*. Menurut Dieter Roth, pendekatan ini dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurut Anthony Downs, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan- pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan

oleh Morris P Fiorina dalam model keputusan pemilu restospektif. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasi-kan satu sama lain. (Munawar, 2015), (Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff , 2009).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian makalah ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu pertama, dengan mencatat seluruh temuan mengenai Perilaku pemilih dalam pilres dan pilkada 2024

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan tidak bersifat kuantitatif dan tidak menggunakan alat ukur statistik. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat alamiah, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan pengujian. Kedua, menganalisis seluruh temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan masing-masing sumber, kelebihan atau hubungannya masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Ketiga, penelitian ini berhubungan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan lapangan atau saksi mata, baik berupa peristiwa, orang, atau benda lain. Keempat, data bersifat readymade, artinya peneliti tidak kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Kelima, kondisi data di perpustakaan tidak terbagi oleh ruang dan waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2024 di Kota Cimahi

Pemilih di Kota Cimahi dapat dikategorikan ke dalam empat tipe utama,

yaitu pemilih rasional, emosional, tradisional, dan pragmatis. Pemilih rasional mempertimbangkan rekam jejak kandidat, program kerja, dan visi-misi sebelum menentukan pilihan. Sebaliknya, pemilih emosional lebih dipengaruhi oleh aspek psikologis dan identitas politik tertentu. Pemilih tradisional cenderung mempertahankan preferensi politik berdasarkan faktor sosial budaya, seperti afiliasi keluarga atau pengaruh komunitas tertentu. Sementara itu, pemilih pragmatis lebih fokus pada manfaat langsung yang dapat mereka peroleh, seperti bantuan sosial atau kebijakan ekonomi yang menguntungkan. Dalam konteks Pemilu 2024, keempat pola pemilih ini saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika politik di Kota Cimahi. Tingkat partisipasi pemilih juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi politik serta akses terhadap informasi yang akurat dan kredibel.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Berbagai faktor berkontribusi terhadap perilaku pemilih di Kota Cimahi. Faktor pertama adalah karakteristik demografi, seperti usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Pemilih muda yang lebih akrab dengan teknologi cenderung memperoleh informasi politik dari media sosial, sementara pemilih yang lebih tua lebih mengandalkan media konvensional dan komunikasi interpersonal. Faktor kedua adalah pengaruh media dan teknologi informasi. Peran media sosial dalam membentuk opini publik semakin dominan, dengan kampanye politik yang semakin interaktif dan berbasis data. Namun, tantangan utama adalah penyebaran disinformasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih secara tidak akurat. Faktor ketiga adalah kinerja pemerintahan sebelumnya. Jika masyarakat merasa puas dengan kebijakan yang diterapkan, kemungkinan besar mereka akan mendukung kandidat

dari partai yang sama. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu, maka pemilih cenderung mencari alternatif politik yang lebih menjanjikan. Faktor keempat adalah kondisi ekonomi dan sosial. Stabilitas ekonomi dapat meningkatkan optimisme pemilih terhadap kandidat petahana, sementara krisis ekonomi atau ketidakstabilan sosial dapat mendorong perubahan preferensi politik.

Implikasi dan Strategi Kampanye yang Efektif

Pemahaman terhadap perilaku pemilih dapat membantu partai politik dan kandidat dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif. Kampanye berbasis data dan pendekatan personal melalui media sosial menjadi strategi utama dalam menarik perhatian pemilih muda. Selain itu, pendekatan komunitas dan komunikasi langsung dengan pemilih juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan politik. Keberhasilan strategi kampanye sangat bergantung pada sejauh mana kandidat dan partai politik mampu mengakomodasi preferensi dan kebutuhan pemilih. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial politik di Kota Cimahi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, perilaku pemilih di Kota Cimahi pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya kombinasi antara aspek rasional dan emosional dalam pengambilan keputusan politik. Faktor demografi, media, kinerja pemerintahan, dan kondisi ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan preferensi pemilih. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika ini dapat membantu dalam merancang strategi politik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat

setempat.

Sebagai rekomendasi, partai politik dan kandidat diharapkan dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan program kerja mereka dengan cara yang lebih interaktif dan transparan. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi politik masyarakat agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berbasis informasi yang kredibel.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif guna memperoleh data empiris yang lebih kuat mengenai pola perilaku pemilih. Penelitian komparatif antara beberapa daerah juga dapat dilakukan untuk memahami variasi dalam preferensi pemilih di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. University of Chicago Press.
- Dalton, R. J. (2014). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. CQ Press.
- Kristian, I. (2021). Perlukah Konservasi Moral?. *Jurnal RASI*, 2(1), 40–53. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.54>
- Kristian, I. (2022). Decision Making in Disaster Management Operations: Challenges and Opportunities. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 82-91.
- Kristian, I. (2022). Sustainable Development and Public Policy Revitalization. *The International Journal of Education Management and Sociology*, 1(2), 41–50. <https://doi.org/10.58818/ijems.v1i2.8>
- Maharani, D., & Kristian, I. (2021).

Konservasi Moral Dan Pembentukan Karakter Menuju Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 49-59.

Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge University Press.

Schmitt-Beck, R. (2017). Political Communication and Elections. Routledge.